

Proyek Pasar Diduga Menyimpang

● Pedagang Mengadu pada Gubernur

SEMARANG - Pembangunan Pasar Ir Soekarno Sukoharjo diduga menyimpang. Karena itu, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) krusial sebelum memutuskan nasib pasar yang kini mangkrak itu.

Hal itu diungkapkan Gubernur Ganjar Pranowo ketika menerima Himpunan Pedagang Pasar Kota Sukoharjo (HPPKS) di gubernuran, Rabu (12/2).

"Dugaan saya, ini (pembangunan pasar) ada yang menyalahgunakan. Namanya selesai ya 100 persen, bukan 80 persen," katanya.

Selain bukti fisik pasar yang belum rampung, Ganjar juga menerima laporan bahwa kontraktor pelaksana lari dari tanggung

jawab. Kontraktor tersebut juga masuk daftar hitam di sejumlah daerah di Jawa Timur.

"Karena itu, Pemkab minta audit dari BPK sebagai dasar keputusan selanjutnya," jelasnya.

Usai audiensi, Ganjar menemui pedagang yang menunggu di depan gerbang kantor gubernur. Kepada mereka, Ganjar berjanji akan berkomunikasi dengan Pemkab Sukoharjo untuk mengetahui kejelasan pembangunan pasar. Ia juga menyampai-

kan, audit BPK sudah selesai dan diserahkan kepada Pemkab Sukoharjo, Rabu (12/2).

Nasib Tak Jelas

HPPKS datang ke Semarang didampingi pengurus Partai Rakyat Demokratik (PRD) Jateng dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Ketua HPPKS Fajar Purwanto mengaku sudah tiga kali bertanya kepada Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, namun tidak memperoleh jawaban pasti. Hal ini membuat nasib 1.023 pedagang tidak jelas. Selama dua tahun mereka berjualan di lokasi darurat yang tidak layak.

"Kini yang bertahan tinggal 30 persen. Ada yang banting setir kerja lain, ada yang mencoba bunuh diri karena terimpit hutang, bahkan ada yang meninggal karena depresi," katanya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Daerah Agoes Soeranto mengatakan, menurut rencana proyek pembangunan Pasar Ir Soekarno Sukoharjo akan dilanjutkan pada 2014. Pemkab Sukoharjo telah mengalokasikan dana Rp 15 miliar pada APBD 2014 dan sisa anggaran tahun sebelumnya Rp 6 miliar.

Pembangunan pasar itu menggunakan anggaran Pemkab Rp 18,5 miliar dan sumbangan Pemprov Jateng Rp 10 miliar. Tender dimenangi PT Ampuh Sejahtera dengan nilai Rp 24,8 miliar.

Tapi hingga batas waktu, kontraktor hanya mampu menyelesaikan 85 persen fisik bangunan, sehingga hanya dibayar Rp 18 miliar. Pemkab yang melihat ada masalah meminta penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tapi karena opini BPKP kurang jelas, Pemkab kemudian meminta audit dari BPK. (H68, J17-59)